ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN KAS DALAM MENINGKATKAN KESEIMBANGAN ANGGARAN ATAS REALISASI BELANJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2022-2023 (BPKPAD KABUPATEN KLATEN)

Tugas Akhir Magang

DISUSUN OLEH:

Nama	: Tiffani Berliana Guntoro
Nomor Mahasiswa	: 21311523
Program Studi	: Manajemen
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN KAS DALAM MENINGKATKAN KESEIMBANGAN ANGGARAN ATAS REALISASI BELANJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2022-2023 (BPKPAD KABUPATEN KLATEN)

Tugas Akhir Magang

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Nama: Tiffani Berliana Guntoro

NIM: 21311523

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini menyatakan bahwa dalam tugas akhir magang ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai ketentuan yang berlaku”

Yogyakarta, 18 Juni 2025



Tiffani Berliana Guntoro

21311523

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Analisis Strategi Pengelolaan Anggaran Kas dalam Meningkatkan Keseimbangan Anggaran atas Realisasi Belanja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2022-2023 (BPKPAD Kabupaten Klaten)

Diajukan Oleh:

Nama	: Tiffani Berliana Guntoro
NIM	: 21311523
Program Studi	: Manajemen S1
Bidang Konsentrasi	: Keuangan

Yogayakarta, 16 Juni 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

NO.: 3428/DEK/10/Prodi.Mj/III/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2023/2024, Selasa 01 Juli 2025, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama	: Tiffani Berliana Guntoro
No. Mahasiswa	: 21311523
Judul Tugas Akhir	: Analisis Strategi Pengelolaan Anggaran Kas Dalam Meningkatkan Keseimbangan Anggaran Atas Realisasi Belanja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2022 sd 2023
Pembimbing	: Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir tersebut dinyatakan:

Lulus Ujian Tugas Akhir

Nilai	: A-
Referensi	: Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji :

Ketua Tim	: Abdur Rafik, S.E., M.Sc.
Anggota Tim	: Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.

Yogyakarta, 01 Juli 2025

Ketua Program Studi Manajemen,

Abdur Rafik, SE., M.Sc.

NIK. 133110105

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN KAS DALAM MENINGKATKAN KESEIMBANGAN ANGGARAN ATAS REALISASI BELANJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2022 SD 2023

Disusun oleh : Tiffani Berliana Guntoro

Nomor Mahasiswa : 21311523

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
hari ini, tanggal: Selasa 01 Juli 2025

Pembimbing TA : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.
Penguji : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

"*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*"

(QS. Al-insyirah: 5-6)

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*"

(QS. Al-Baqarah: 286)

"*Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia*"

"*Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri*"

(Daniel Baskara Putra - Hindia)

KATA PENGANTAR

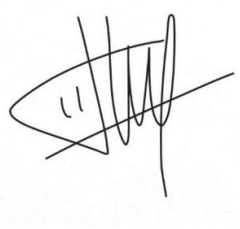
Dengan mengucap syukur alhamdulillah hirabbil ‘alamin atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir magang yang berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Anggaran Kas dalam Meningkatkan Keseimbangan Anggaran atas Realisasi Belanja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2022-2023 (BPKPAD Kabupaten Klaten)” sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) di Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa Tugas akhir magang ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir magang ini.
2. Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, memberikan arahan dan saran, serta membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir magang ini.
4. Seluruh staf dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yang telah membantu penulis dalam usaha memperoleh data dan informasi yang penulis perlukan.
5. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Dody Herdian Fajar Guntoro dan Ibu Eni Kusmiyati yang selalu memberikan semangat, dorongan, dukungan, perhatian, dan senantiasa mendoakan penulis tiada henti.
6. Kepada kakak dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir magang ini yang tidak bisa disebut satu persatu.
7. Kepada sahabat saya Azizah, Vanadya, Echi, Fahrin, dan Erlinda serta teman-teman penulis yang lain yang selalu menemani, saling berbagi ilmu,

dan memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir magang ini.

8. Kepada Jeong Jaehyun melalui karya, musik, dan inspirasinya yang menjadi sumber semangat penulis dalam melewati berbagai proses dan tantangan selama penyusunan tugas akhir magang.
9. Kepada seluruh pihak tidak mungkin untuk disebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga tugas akhir magang ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, komitmen, dan semangat yang terus dijaga dalam menghadapi setiap proses penyusunan tugas akhir magang ini, sebagai bentuk tanggung jawab dan pembuktian atas kemampuan diri dalam menuntaskan perjalanan studi dengan penuh dedikasi.

Yogyakarta, 18 Juni 2025



Tiffani Berliana Guntoro

21311523

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN MAGANG i
HALAMAN JUDUL MAGANG ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR v
HALAMAN MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Landasan Teori 6
2.2 Penelitian Terdahulu 10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 12
3.1 Pendekatan 12
3.2 Unit Analisis 12
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 13
3.4 Teknik Analisis Data 14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 15
4.1 Profil Organisasi 15
4.2 Deskripsi Data 18
4.3 Hasil Penelitian 20
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 27
BAB V PENUTUP 31

5.1 Kesimpulan 31
5.2 Saran 31
DAFTAR PUSTAKA 33
LAMPIRAN 40

DAFTAR TABEL

4. 1 Surplus/Defisit dan SiLPA Kabupaten Klaten Tahun 2022-2023 18

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten 17
4.2 Alur Strategi pengelolaan Kas..... 26

ABSTRAK

Masalah ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih menjadi hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana publik, termasuk di Pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Penelitian ini mengkaji Strategi Pengelolaan Anggaran Kas dalam meningkatkan Keseimbangan Anggaran atas Realisasi Belanja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2022-2023, dengan tujuan utama untuk menilai efektivitas strategi pengelolaan kas yang diterapkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efisiensi dan keseimbangan fiskal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen resmi. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan anggaran kas yang digunakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Klaten masih belum efektif dalam menyesuaikan belanja dengan perubahan pendapatan yang terlihat dari besarnya SiLPA dan penumpukan belanja di akhir tahun. Hasil ini menyoroti pentingnya perencanaan kas yang didasarkan pada data historis, pemantauan yang terintegrasi, dan kerjasama antar lembaga sebagai landasan untuk mencapai keseimbangan anggaran dan efisiensi keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga mendorong penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode kuantitatif dengan cakupan data yang lebih luas untuk memperdalam wawasan tentang manajemen keuangan publik.

Kata kunci: pengelolaan anggaran kas, keseimbangan anggaran, SiLPA, manajemen keuangan daerah, efisiensi anggaran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena sosial yang muncul baru-baru ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja daerah di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Klaten. Berbagai hambatan sering ditemui oleh pemerintah daerah dalam menghadapi ekspektasi masyarakat yang meningkat mengenai kualitas layanan dan alokasi pengembangan infrastruktur. Menurut (Handayani et al., 2024), penyerapan anggaran yang rendah dan penurunan kinerja pemerintah daerah sebagian besar disebabkan oleh masalah-masalah seperti kas terbatas, penundaan alokasi anggaran, serta ketidakcocokan antara perencanaan program dengan implementasinya.

Dalam konteks yang lebih luas, masalah tata kelola keuangan daerah kini telah menjadi perhatian strategis di tingkat nasional, terutama setelah pandemi *COVID-19*, yang telah menyebabkan tekanan fiskal yang berkelanjutan pada pemerintah daerah. (Kurnia Indriani et al., 2022) menerangkan bahwa pandemi *COVID-19* memberikan beban berat terhadap anggaran pemerintah daerah karena telah menyebabkan peningkatan kebutuhan pengeluaran dan penurunan pendapatan asli daerah yang sehingga mengharuskan adanya perubahan besar dalam kebijakan pengelolaan keuangan.

Kabupaten Klaten menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan fiskal, karena sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada periode 2022 hingga 2023, penggunaan anggaran operasional di Kabupaten Klaten bisa dikatakan cukup optimal, namun pengeluaran untuk modal masih menunjukkan hasil yang perlu ditingkatkan. Terutama pada periode tahun 2022, dimana hanya tercapai 84% dari total anggaran yang direalisasikan (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023). Meskipun ada peningkatan pada tahun 2023, adanya SiLPA yang signifikan sebesar Rp 529,6 miliar di tahun 2022 dan Rp 319,4 miliar pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya efisien (Pemerintah Kabupaten

Klaten, 2023, 2024). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan menyeluruh terhadap strategi pengelolaan kas agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata daerah dan responsif terhadap perkembangan fiskal yang terus berubah.

Dalam konteks keuangan publik, anggaran kas sangat penting dalam membentuk kinerja pengelolaan fiskal daerah. Perencanaan strategi pengelolaan kas yang *feasible* dan dengan berdasarkan proyeksi yang akurat, menjadi dasar yang penting dalam menjamin keberlangsungan realisasi belanja pemerintah daerah. Edtiyarsih & Izzabillah (2023) menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara anggaran kas dan kebutuhan operasional yang sebenarnya di lapangan sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran serta dapat mengurangi efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan dana publik.

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis pelaporan keuangan maupun penilaian realisasi anggaran, sering kali mengabaikan hubungan strategi pengelolaan kas yang efektif dengan pencapaian keseimbangan anggaran. Studi yang dilakukan oleh Antonius (2023) utamanya hanya berfokus pada kinerja keuangan regional dengan menggunakan metode analisis vertikal dan horizontal, namun tidak membahas secara mendalam mengenai strategi pengelolaan kas. Perbedaan ini menjadi dasar dari penelitian ini, yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang terdapat dalam literatur yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan anggaran kas yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten periode tahun 2022-2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi tersebut dalam mencapai keseimbangan antara anggaran dengan realisasi belanja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang berusaha untuk memaparkan kondisi realitas di lapangan yang berkaitan dengan praktik pengelolaan anggaran kas di pemerintahan daerah Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan menawarkan solusi alternatif strategi yang dapat meningkatkan kinerja fiskal secara keseluruhan.

Fokus teori dari penelitian ini adalah berkisar pada prinsip *value for money*, di samping pendekatan *public financial management*. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pengelolaan keuangan publik. Konsep keseimbangan anggaran adalah instrumen utama untuk menentukan bagaimana pendapatan dan pengeluaran yang berkelanjutan berhubungan satu sama lain. Viroza & Yasmin (2025) menerangkan bahwa dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran kas diperlukan kerja sama antara tim perencanaan, pelaksanaan program, dan bendahara umum daerah. Upaya kerja sama tim tersebut untuk memastikan bahwa sistem keuangan daerah berjalan dengan cara yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Penelitian ini untuk memperkuat dasar-dasar teori manajemen keuangan daerah sekaligus memberikan wawasan praktis yang dapat bermanfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menciptakan strategi pengelolaan anggaran kas yang lebih adaptif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran serta efisiensi belanja pemerintah daerah secara keseluruhan. Wulandari et al. (2021) menjelaskan bahwa kumulasi penggunaan anggaran pada akhir tahun sering kali menyebabkan pemborosan dana, pemilihan program yang tidak efisien, pelaksanaan proyek yang terburu-buru dan kurang direncanakan dengan baik. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penganggaran daerah yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.

Dengan demikian, pentingnya penelitian ini sangat besar, baik dalam aspek pengembangan teori maupun dalam penerapan praktis. Di tengah kondisi keuangan yang terbatas dan kebutuhan akan efisiensi yang semakin meningkat, strategi pengelolaan anggaran kas yang efektif adalah instrumen penting dalam menjamin keberlangsungan pembangunan serta pelayanan publik yang berkualitas di kabupaten Klaten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna mengenai keterkaitan antara strategi

pengelolaan anggaran kas dengan keseimbangan anggaran, sebuah topik yang sampai saat ini masih jarang dibahas secara komprehensif dalam penelitian ilmiah sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi keuangan daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2022 sd 2023 mempengaruhi keseimbangan anggaran atas realisasi belanja keuangan daerah?
2. Bagaimana strategi yang dapat diambil dalam pengelolaan anggaran kas dalam upaya meningkatkan keseimbangan anggaran atas realisasi belanja keuangan daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2022 sd 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi keuangan daerah dalam mempengaruhi keseimbangan anggaran atas realisasi belanja keuangan daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2022 sd 2023.
2. Untuk mengkaji strategi pengelolaan anggaran kas dalam upaya meningkatkan keseimbangan anggaran atas realisasi belanja keuangan daerah kabupaten Klaten periode tahun 2022 sd 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat hasil pelaksanaan magang antara lain sebagai berikut:

1. BPKPAD Kabupaten Klaten
    1. Memberikan gambaran umum kondisi keuangan daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2022 sd 2023.
    2. Membantu memperbaiki strategi pengelolaan anggaran kas dalam meningkatkan keseimbangan anggaran atas realisasi belanja keuangan daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2022 sd 2023.
    3. Membantu BPKPAD Kabupaten Klaten dalam meninjau kembali kinerja pengelolaan anggaran kas yang sudah dilaksanakan.

2. Bagi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
    1. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai penelitian di bidang manajemen keuangan, yang tidak hanya relevan namun juga secara efektif membahas isu strategis yang sedang berkembang.
    2. Menambah capaian luaran akademik yang dapat meningkatkan akreditasi program studi serta memperkuat hubungan program studi dengan kebutuhan dunia kerja serta masyarakat secara keseluruhan.
3. Bagi Mahasiswa
    1. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai keuangan daerah terutama dalam pengelolaan anggaran kas.
    2. Mengembangkan kemampuan analisis dalam menerapkan teori keuangan publik secara langsung pada situasi yang nyata.
    3. Mengembangkan keterampilan akademik dan profesional dalam menyusun karya ilmiah yang berdasarkan data empiris.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan Publik

Manajemen keuangan publik mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan negara dengan pendekatan yang sistematis. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Manajemen keuangan publik tidak hanya melibatkan pengelolaan anggaran, namun juga melibatkan pendekatan komprehensif untuk menangani sumber daya publik secara bertanggung jawab, memastikan sumber daya tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip transparansi dan peningkatan sistem pengendalian internal merupakan elemen kunci yang mendorong penggunaan anggaran kas secara efektif di tingkat daerah. Menurut (Kartika & Gorda, 2022), sistem pengendalian internal dan keterbukaan dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh terhadap efisiensi anggaran daerah.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen keuangan publik sebagai landasan teoritis utama untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengendalikan pengelolaan anggaran kas. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kebutuhan pengeluaran dan pengelolaan kas yang tersedia, terutama dalam konteks pasca pandemi. Manajemen keuangan didasarkan pada kinerja dan akuntabilitas publik, yang keduanya memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas anggaran kas. Menurut (Hasanah & Yanto, 2021), hasil baik dalam kinerja keuangan pemerintah tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam pengelolaan anggaran, namun juga mencerminkan tingkat akuntabilitas publik dalam mengelola keuangan

secara keseluruhan. Teori manajemen keuangan publik memberikan landasan teoritis yang kuat yang menjelaskan bahwa efektivitas strategi anggaran kas daerah dipengaruhi oleh penerapan prinsip manajemen yang akuntabel terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Manajemen Kas Daerah

Manajemen kas daerah adalah proses mengelola arus kas masuk dan keluar untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah secara efisien. Penelitian ini meninjau peran manajemen kas sebagai faktor penting dalam mengidentifikasi penyebab terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan keterlambatan dalam realisasi belanja. Perencanaan dan implementasi arus kas yang efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Menurut (Paputungan, 2023), ketidakpastian dalam memperkirakan arus kas sering kali menjadi penyebab utama timbulnya SiLPA dan berpengaruh pada minimnya tingkat pelaksanaan pengeluaran daerah. Penelitian ini berupaya untuk mengukur keberhasilan strategi pengelolaan kas dalam mendukung efisiensi fiskal dan meningkatkan pelaksanaan program kerja daerah. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengkaji secara mendalam bagaimana teknik manajemen kas yang digunakan dapat menjamin stabilitas keuangan dan beradaptasi dengan fluktuasi pendapatan daerah serta kebutuhan belanja publik yang terus meningkat.

2.1.3 Anggaran Daerah

Anggaran daerah bisa diartikan sebagai rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan disahkan melalui peraturan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tercermin dalam rencana keuangan tahunan yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengalokasikan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut (Zulfan Heri et al., 2022), rencana keuangan daerah sangat penting untuk menjaga pengelolaan keuangan yang efektif dan melaksanakan strategi pembangunan secara bertanggung jawab. Anggaran daerah tidak hanya sebatas pada angka dari laporan, namun juga berfungsi sebagai contoh

kebijakan strategis yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami anggaran daerah sebagai aspek mendasar dalam memahami proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian anggaran oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana pengelolaan anggaran telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, konsep tersebut membentuk kerangka awal untuk mengevaluasi bagaimana anggaran berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang responsif dan berorientasi pada layanan.

2.1.4 Konsep Keseimbangan Anggaran

Keseimbangan anggaran adalah suatu kondisi di mana total pendapatan daerah selaras dengan keseluruhan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Teori klasik menunjukkan bahwa keseimbangan mencerminkan efisiensi fiskal dan pengelolaan keuangan publik yang bijaksana. Menurut (Febrianto et al., 2024), berpendapat bahwa menurut teori klasik, menjaga keseimbangan fiskal dipandang sebagai cara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah pengeluaran yang tidak perlu dari keuangan publik. Penelitian ini menggunakan konsep keseimbangan anggaran untuk menelaah bagaimana pemerintah daerah berhasil mempertahankan stabilitas fiskal sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan. Fokus penelitian ini ada pada apakah kebijakan anggaran masih dipengaruhi oleh kekuatan administratif atau oleh fleksibilitas fiskal. Sangat penting untuk menilai efektivitas strategi keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

2.1.5 Strategi Pengelolaan Anggaran kas

Strategi pengelolaan kas daerah mencakup serangkaian tindakan untuk mengelola arus kas, memprioritaskan pengeluaran dan menetapkan jadwal pembayaran. Penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan kas sebagai objek analisis utama untuk menilai seberapa efektif pemerintah daerah bisa menyesuaikan dengan fluktuasi pendapatan dan pengeluaran

anggaran, sambil memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Tujuan pendekatan ini untuk mengidentifikasi pola pengelolaan kas dalam menyeimbangkan antara fleksibilitas fiskal dengan disiplin anggaran, untuk menghindari pemborosan dalam penggunaan anggaran. Menurut (Ginting, 2024), pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan kas yang dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak, namun tetap mengikuti prinsip efisiensi keuangan jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pengelolaan likuiditas dan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.6 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dalam teori *Value for Money*, terdapat dua konsep utama yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan anggaran yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menghasilkan output setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang minimal, sedangkan efektivitas adalah berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kedua konsep tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Menurut (Rahman, 2022), menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah yang efisien dan efektif adalah indikator penting kinerja keuangan pemerintah dalam melaksanakan program pengembangan secara maksimal dan memberikan keuntungan. Konsep efisiensi dan efektivitas merupakan alat evaluasi yang sangat berguna untuk menganalisis ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dengan konsep tersebut dapat diidentifikasi apakah pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan prioritas daerah. Konsep tersebut juga berperan penting dalam menilai sejauh mana kebijakan anggaran daerah memberikan nilai tambah dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023), mengenai urgensi anggaran kas dalam mewujudkan pelaksanaan APBD yang efisien, menjelaskan peran penting anggaran kas dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pendekatan kualitatif deskriptifnya dan studi kasus, penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kegiatan pemerintah daerah secara signifikan ditingkatkan dengan perencanaan anggaran kas yang baik melalui metode kolaboratif. Hasil utama penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kas yang efisien tidak hanya mempercepat pencairan anggaran, tetapi juga meminimalkan penundaan pelaksanaan kegiatan dan mngurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Sedangkan penelitian (Jaya et al., 2020), mengenai konstruksi kebijakan desentralisasi fiskal berbasis paradigma good financial governance di Indonesia, menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mengelola keuangan daerah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kerangka regulasi fiskal dan implementasi kebijakan manajemen keuangan daerah di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa inefisiensi dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan fiskal berasal dari perencanaan anggaran kas yang tidak memadai dan ketidaksesuaian antara siklus anggaran dan arus kas di berbagai daerah. Penelitian tersebut secara signifikan meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana manajemen keuangan publik yang efektif berfungsi sebagai fondasi penting untuk transisi fiskal yang sukses.

Fokus utama dari penelitian ini didukung oleh studi teoritis dan empiris, yang menyoroti pentingnya pengelolaan kas daerah dalam mencapai efisiensi dan mempertahankan keseimbangan anggaran. Namun demikian, ruang lingkup penelitian terdahulu tersebut terbatas karena difokuskan pada tingkat makro dan belum secara khusus membahas mengenai strategi pengelolaan anggaran kas di tingkat pemerintah kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dengan memberikan analisis menyeluruh tentang Kabupaten

Klaten dan mengkaji strategi pengelolaan kas praktis untuk mencapai keseimbangan optimal antara pendapatan dan realisasi belanja daerah. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memperdalam pemahaman teknis tentang pengelolaan kas tetapi juga memberikan wawasan strategis dan manajerial yang baru yang lebih adaptif, efisien, dan kontekstual dalam pengelolaan fiskal daerah.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai strategi pengelolaan anggaran kas yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Menurut (Fadli, 2021), penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena sosial atau kemanusiaan dengan menciptakan deskripsi yang kompleks dan komprehensif melalui narasi lisan, menangkap sudut pandang informan secara detail, dan dilaksanakan dalam situasi alami dimana peristiwa berlangsung. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menggali informasi secara mendalam dari para pemangku kebijakan sekaligus secara efektif menangkap dinamika fenomena yang berlangsung dalam konteks yang nyata dan relevan.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, sangat efektif untuk menganalisis berbagai sumber informasi, termasuk dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil wawancara, serta observasi lapangan. Menurut (Frezy & Febriyanti, 2025), metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan data lapangan yang mencakup analisis dokumen laporan keuangan serta perspektif dari para pihak yang terlibat. Penelitian ini tidak hanya sekedar mendeskripsikan fenomena, namun juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian di bidang manajemen keuangan publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada praktik nyata yang terjadi di tingkat daerah.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan anggaran kas yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2022 sampai dengan 2023. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kas dilaksanakan

untuk menjaga keseimbangan anggaran, terutama terkait dengan realisasi belanja keuangan daerah. Pendekatan analisis ini tidak hanya menganalisis laporan realisasi APBD, namun juga menggali kebijakan internal, prosedur kerja, dan dinamika pengambilan keputusan di dalam Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Melalui penggunaan metode kualitatif deskriptif, unit analisis ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai lingkungan institusi, proses operasional, dan pertimbangan strategis yang menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran kas secara efisien di tingkat daerah. Menurut (Rifa'i, 2023), metode penelitian kualitatif memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks dan dinamika sosial yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti serta metode tersebut memudahkan pengumpulan data dan informasi yang beragam dan bermanfaat melalui cara seperti wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam strategi pengelolaan anggaran kas. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf pada bidang perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) periode tahun 2022-2023 dan dokumen kebijakan lain yang berkaitan dengan sistem pengelolaan anggaran kas. Menurut (Undari Sulung, 2021), data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan objek penelitian, sementara data sekunder diperoleh dari informasi yang sudah ada, seperti dokumen resmi atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Kombinasi kedua jenis data tersebut memberikan data yang kuat untuk mengevaluasi bagaimana strategi pengelolaan anggaran kas dirancang, diimplementasikan, serta dioperasikan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah secara efektif.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terperinci. Wawancara dilakukan untuk memastikan informasi relevan dengan penelitian. Observasi dilakukan langsung selama melaksanakan kegiatan magang pada bulan Februari 2024 hingga Juni 2024. Dokumen analisis dilakukan untuk mengidentifikasi aspek administratif dan kebijakan yang mempengaruhi strategi keuangan daerah. Proses pengumpulan data dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta tepat mengenai strategi pengelolaan anggaran kas dalam mempertahankan keseimbangan fiskal daerah. Menurut (Ardiansyah et al., 2023), dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara yang menyoroti pandangan peserta, observasi langsung dimana dilakukan pengamatan langsung terhadap tindakan dan situasi sosial, dan analisis dokumen yang berisi informasi tentang sejarah dan kebijakan.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Menurut (Sitasari, 2022), analisis tematik berfungsi sebagai teknik dasar dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk secara teratur mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menampilkan pola atau tema yang muncul dari data, yang selanjutnya dianalisis untuk membentuk kesimpulan, serta diintegrasikan ke dalam pendekatan teori yang berorientasi pada fakta. Tujuan utamanya dari penelitian ini untuk memahami strategi pengelolaan anggaran kas secara menyeluruh yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menjaga keseimbangan antara anggaran dan realisasi belanja keuangan daerah. Menurut (Rozali, 2022), teknik analisis tematik mirip dengan teknik analisa yang lain, di mana memahami data yang ada merupakan tahap awal. Penting bagi peneliti untuk meluangkan waktu untuk memahami dan mengenal data yang sudah ada dengan baik secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan bisa memberikan hasil yang kredibel, akurat, dan transparan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Organisasi

4.1.1 Sejarah Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten resmi berubah menjadi bentuk baru dari BPKD dulunya, sejak tanggal 1 januari 2022. Perubahan tersebut merupakan hasil dari penerapan Peraturan daerah kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021, yang telah merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2016. Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih terkoordinasi melalui sistem informasi pemerintahan, khususnya pada aspek klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan publik (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten klaten, n.d.).

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) merupakan sebuah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, aset, dan pendapatan daerah. Sebelum berubah nama menjadi BPKPAD, dulunya bernama Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD). Adapun visi dan misi dari BPKPAD Kabupaten Klaten sebagai berikut, visi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi.”

Nilai-nilai budaya tempat kerja meliputi prinsip-prinsip moral dan etika yang mencakup elemen-elemen sosial-budaya positif yang relevan, berpedoman, etika, dan nilai-nilai kinerja produktif yang bersumber dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesionalisme, kejujuran, disiplin, kreativitas, pelayanan, dan sinergi merupakan bagian dari nilai budaya tersebut. Pengembangan budaya kerja dapat berhasil dilaksanakan apabila ada beberapa hal yang mendukung, yaitu komitmen, pemahaman terhadap cita-cita budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dan

kesungguhan dalam melaksanakannya. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menerapkan budaya kerja salah satunya dengan mengadakan diskusi dan koordinasi untuk memecahkan masalah dalam rangka menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

4.2.1 Layanan

1) **Pengelolaan keuangan**

   Pengelolaan keuangan daerah adalah tugas penting BPKPAD, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, mengelola kas termasuk kebutuhan pembayaran gaji, pengawasan pengeluaran operasional dan nonoperasional, serta penyusunan dan pelaporan keuangan daerah secara rutin dan berkala.

2) **Pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD)**

   BPKPAD juga berperan penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyajikan layanan pembayaran dan pelaporan untuk berbagai macam pajak daerah, seperti PBB, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain. BPKPAD juga meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui kerjasama antar instansi.

3) **Pengelolaan Aset daerah**

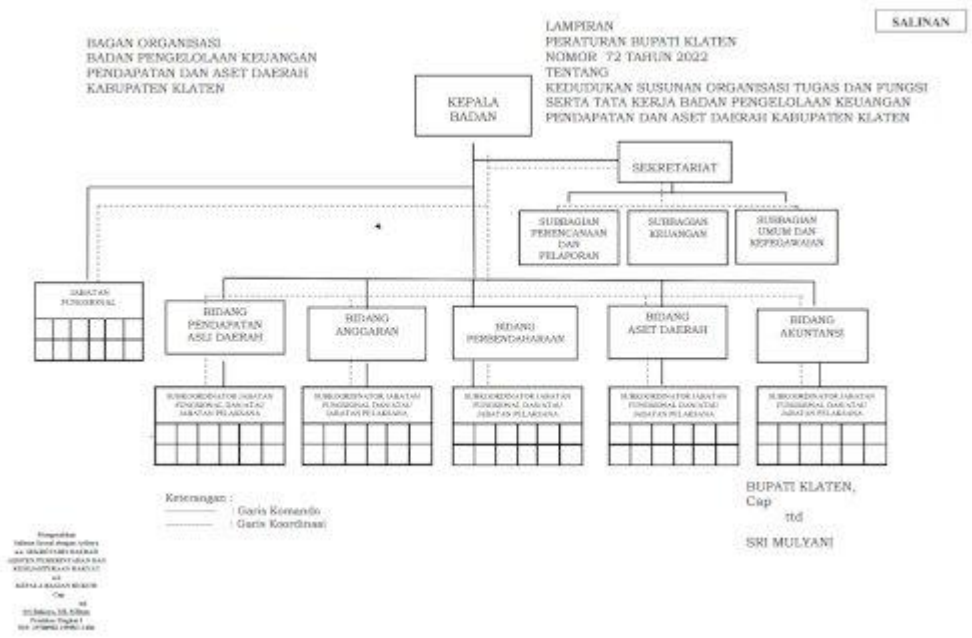
   Layanan penting lainnya yang dilakukan BPKPAD adalah pengelolaan aset daerah secara menyeluruh, seperti langkah-langkah inventaris, pengadaan, distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Fokus pada peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) agar dapat membantu peningkatan PAD, salah satunya melalui cara penyewaan atau kolaborasi dalam pemanfaatan aset.

4) **Pelayanan Informasi dan Pengaduan**

   Dalam memberikan layanan informasi dan pengaduan, BPKPAD memberikan kesempatan kepada masyarakat dan instansi daerah untuk mengakses data keuangan, pendapatan, dan informasi daerah.

Selain itu, BPKPAD juga menangani keluhan dan permintaan masyarakat melalui saluran resmi yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik.

4.3.1 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat: Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pendapatan Asli Daerah
d. Bidang Anggaran
e. Bidang Perbendaharaan
f. Bidang Aset Daerah
g. Bidang Akuntansi

h. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

4.2 Deskripsi Data

Selama dua tahun anggaran terakhir yaitu periode tahun 2022 hingga 2023, penyesuaian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam pendapatan, belanja, dan keseimbangan anggaran (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023, 2024).

Tabel 4. 1 Surplus/Defisit dan SiLPA Kabupaten Klaten Tahun 2022-2023

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp Miliar)	Belanja Daerah (Rp Miliar)	Surplus/Defisit (Rp Miliar)	SiLPA (Rp Miliar)	Presentase Realisasi
2022	2.587,69	1.873,84	713,85	529,6	84,45%
2023	2.672,89	2.842,75	(169,86)	319,4	88,83%

Sumber: Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Audited), BPKPAD Kabupaten Klaten (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023, 2024).

Berdasarkan pada dokumen laporan keuangan yang resmi, pada tahun 2022 mencatat surplus anggaran sebesar Rp 713,83 miliar dengan SiLPA Rp 529,6 miliar (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023). Sedangkan tahun 2023 terjadi defisit anggaran sebesar Rp 169,86 miliar meskipun pendapatan meningkat dan dengan SiLPA tetap tinggi sebesar Rp 319,4 miliar (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa tidak seimbangnya fiskal akibat realisasi belanja yang belum optimal dan pengelolaan anggaran yang kurang maksimal.

Belanja modal yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan anggaran meningkat dari 84,45% pada tahun 2022 menjadi 88,83% pada tahun 2023 (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023, 2024), namun, masih belum memenuhi target tertinggi dan dipengaruhi oleh SiLPA yang tinggi yang menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan dan kurang efisiennya dalam alokasi anggaran untuk pembangunan daerah. Wawancara dengan pihak BPKPAD

Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa realisasi belanja seringkali terkendala oleh keterlambatan dalam dokumen pencairan, sistem keuangan yang masih bersifat umum tanpa perencanaan yang jelas, evaluasi triwulan yang tidak cukup responsif, serta kurangnya koordinasi antar dinas kerja selama perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan analisis terhadap data keuangan dan hasil observasi, peningkatan pendapatan daerah tidak diimbangi dengan pengelolaan belanja yang maksimal. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kondisi keuangan menjadi tidak seimbang, di mana satu tahun dapat mencatat surplus besar sementara tahun berikutnya mengalami defisit. Pola ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan belum sepenuhnya adaptif untuk mengatasi tantangan dan perkembangan kebutuhan nyata dalam proses alokasi anggaran, sebagaimana dikemukakan oleh (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023) tentang pentingnya fleksibilitas dalam manajemen kas daerah.

Salah satu tanda kurang efisiennya pengelolaan kas adalah angka SiLPA terus meningkat secara signifikan selama dua tahun terakhir sebesar Rp 529,6 miliar pada tahun 2022 (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023) dan Rp 319,4 miliar pada tahun 2023 (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana belum dioptimalkan untuk mendukung program-program utama daerah. Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi pengelolaan kas yang lebih adaptif, berdasarkan data historis, kebutuhan saat ini dan evaluasi berkelanjutan.

Jika tidak ada sistem terpadu dan prosedur evaluasi yang memadai, ketidakseimbangan anggaran akan terus berlanjut dan menghalangi tercapainya efisiensi keuangan secara menyeluruh. Seperti ditegaskan oleh (Salman & Ikbal, 2025), efisiensi anggaran adalah lemahnya evaluasi dan pengawasan. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, maka implementasi anggaran berisiko tidak optimal serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa ketidakseimbangan

anggaran akan terus berlanjut jika tidak ditopang oleh sistem evaluasi kinerja yang baik.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Keseimbangan Anggaran Periode Tahun 2022-2023

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk tahun anggaran 2022 hingga 2023 secara signifikan mempengaruhi keseimbangan anggaran, terutama berkaitan dengan realisasi belanja daerah. Berdasarkan data laporan keuangan daerah, pada tahun 2022, tercatat surplus anggaran sebesar Rp 713,85 miliar dengan SiLPA sebesar Rp 529,6 miliar. Data dokumen menunjukkan SiLPA yang signifikan di tahun 2022 dan 2023. Hasil wawancara mendukung temuan ini, dengan pernyataan narasumber bahwa “Rencana penerimaan kadang lebih kecil dari realisasi belanja sehingga harus disesuaikan” (Wawancara, 2025). Observasi lapangan juga menunjukkan tumpukan dokumen menjelang akhir tahun anggaran. Kombinasi temuan ini memperkuat interpretasi bahwa strategi pengelolaan kas yang bersifat triwulan belum cukup responsif menghadapi fluktuasi pendapatan dan kebutuhan belanja yang dinamis. Sebaliknya, tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp 169,86 miliar meskipun SiLPA cukup tinggi di angka Rp 319,4 miliar. Meskipun realisasi belanja modal meningkat dari 84,45% menjadi 88,83% tingginya SiLPA selama dua tahun berturut-turut menunjukkan penggunaan anggaran yang belum maksimal dan berpengaruh pada efektivitas program daerah (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023, 2024).

Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa masalah ketidakseimbangan anggaran di Kabupaten Klaten berasal dari lemahnya perencanaan keuangan dan sistem pengelolaan anggaran, sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber bahwa banyak kegiatan baru terlaksana pada akhir triwulan akibat lambatnya revisi anggaran dan minimnya koordinasi antar unit kerja. Hal

tersebut diperkuat oleh pernyataan narasumber yang menjelaskan bahwa *"banyak kegiatan baru terlaksana pada triwulan akhir karena lambatnya proses revisi anggaran, sehingga dokuemn-dokumen pendukungnya pun sering terlambat, ditambah koordinasi antar unit kerja juga belum berjalan optimal"* (Wawancara, 2025). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf & Muthi'ah (2019), yang menunjukkan bahwa keterlambatan dalam memperbarui (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA dan kurangnya kerja sama antar unit kerja menjadi faktor utama yang menyebabkan penumpukan dalam realisasi anggaran. Sejalan dengan hal tersebut Alfarisi & Nugroho (2017), juga menekankan bahwa pelaksanaan anggaran yang tidak efektif seringkali disebabkan oleh revisi yang terlambat serta koordinasi yang buruk antar unit kerja. Pendapat ini juga didukung oleh (Febrianty et al., 2023), yang berpendapat bahwa SiLPA yang tinggi mencerminkan perencanaan kas yang kurang baik dan implementasi strategi belanja yang tidak efisien.

Akan tetapi, hasil penelitian ini berlawanan dengan temukan yang disampaikan oleh (Antonius, 2023), yang menunjukkan bahwa biasanya, kekurangan anggaran disebabkan oleh turunnya pendapatan daerah. Di Kabupaten Klaten, pendapatan daerah dalam dua tahun terakhir tetap konsisten bahkan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, isu utama terkait ketidakseimbangan anggaran sebaiknya lebih difokuskan pada kendala struktural dan administratif yang belum sepenuhnya ditangani.

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk memiliki strategi pengelolaan anggaran yang didasarkan pada data masa lalu dan didukung oleh sistem pemantauan keuangan yang terintegrasi. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan (Jiman et al., 2025), yang menyatakan bahwa untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja secara efektif harus ada sistem pemantauan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan dengan efisien dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah perlu mengubah fokus pada penyerapan anggaran yang terlihat ke arah

peningkatan kualitas pengeluaran yang direncanakan, pelaksanaan tepat waktu, dan mendorong antar sektor. Namun, keterbatasan data laporan keuangan yang terbatas serta ruang lingkup wawancara yang terbatas menghambat pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengelolaan keuangan.

4.3.2 Strategi Pengelolaan Anggaran Kas untuk Meningkatkan Keseimbangan

Selama tahun 2022 hingga 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menerapkan strategi pengelolaan anggaran kas berupa penyusunan rencana pengelolaan kas secara triwulan, penyesuaian belanja dengan pendapatan, serta evaluasi berkala. Namun, pelaksanaannya strategi ini menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlambatan pengajuan dokumen, kurangnya persiapan teknis di beberapa organisasi pemerintah daerah, sistem monitoring internal yang kurang efektif, serta koordinasi antar unit kerja yang belum berjalan optimal. Narasumber menjelaskan bahwa *"monitoring memang dilakukan setiap triwulan, namun realisasi seringkali tidak sesuai rencana, sehingga ketika belanja menumpuk di akhir tahun, dokumen pencairan jadi terburu-buru dan banyak yang tidak lengkap"* (Wawancara, 2025). Hambatan tersebut menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran dan menimbulkan penumpukan kegiatan di akhir triwulan. (Pambudi, 2021), menekankan bahwa salah satu faktor utama keterlambatan dalam pengeluaran anggaran dan penumpukan pelaksanaan program di akhir periode adalah kurangnya koordinasi dan pengawasan internal yang memadai di dalam pemerintahan.

Temuan dari penelitian ini memperkuat pendapat (Ulfah et al., 2024), yang menekankan pentingnya menyusun strategi kas berdasarkan proyeksi yang realistis dan komprehensif, serta mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan pandangan (Laoli et al., 2022), yang menyoroti bahwa sistem informasi pengelolaan kas seperti SIPD sangat penting untuk menyediakan data likuiditas yang

akurat dan relevan secara tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik.

Di Kabupaten Klaten, metode pengelolaan kas yang bergantung pada prosedur administratif kurang fleksibel ketika menghadapi ketidaksesuaian nyata antara pendapatan dan belanja. Hal tersebut sesuai dengan pejelasan informan marasumber yang menyebutkan bahwa *"strategi pengelolaan kas sebenarnya sudah ada, namun lebih bersifat prosedural dan tidak banyak berubah meskipun kondisi penerimaan berubah, sehingga ketika realisasi pendapatan lebih rendah, pengeluaran harus segera dibatasi"* (Wawancara, 2025). Temuan ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh (Kaharuddin et al., 2023), yang menemukan bahwa strategi penyerapan anggaran bisa tetap berjalan dengan baik jika perencanaan mempertimbangkan konteks dan beradaptasi terhadap perubahan teknis yang ada. Penelitian mereka menunjukkan bahwa kendala selama pandemi bukanlah hambatan utama, asalkan strategi dirumuskan melalui proses kolaboratif, berdasarkan data lapangan yang akurat serta mempertimbangkan aspek teknis dan keterlibatan pemangku kepentingan secara tepat. Sebagai hasilnya, kendala yang paling signifikan yang muncul dalam situasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tampaknya lebih disebabkan oleh masalah internal, seperti kurangnya efektivitas pengawasan dan prosedur yang kurang fleksibel, dibandingkan dengan pengaruh dari faktor luar seperti perubahan kebijakan nasional.

Strategi pengelolaan anggaran kas untuk keseimbangan anggaran dapat diterapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

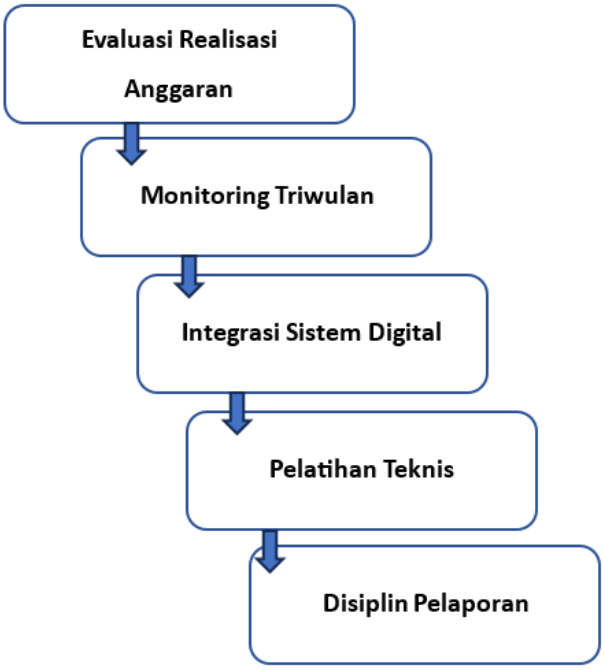
1) Evaluasi realisasi anggaran sangat penting untuk menyesuaikan strategi anggaran sesuai dengan kondisi aktual yang berguna untuk membantu mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran serta menjaga stabilitas likuiditas keuangan daerah. Menurut (Makaminang et al., 2022), evaluasi pelaksanaan anggaran di tingkat pemerintah daerah penting

untuk mengidentifikasi perbedaan antara rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang sebenarnya terjadi yang berfungsi sebagai strategi kunci untuk memastikan stabilitas keuangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Monitoring bulanan disarankan untuk menerapkan strategi yang lebih mudah beradaptasi terhadap pengelolaan kas yang lebih fleksibel, yaitu suatu kerangka kerja anggaran kas yang diperiksa dan disesuaikan setiap bulan, bukan hanya sekedar setiap triwulan. Menurut (Prasetia et al., 2024), pengimplementasian sistem monitoring keuangan anggaran yang konsisten memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi keuangannya dengan lebih cepat dan fleksibel sebagai respons terhadap perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran lokal. Pengelolaan kas yang monitoring secara bulanan lebih mudah menyesuaikan proyeksi dan distribusi kas secara fleksibel mengikuti fluktuasi realisasi pendapatan dan kebutuhan belanja yang sebenarnya.
3) Integrasi sistem digital sangat penting untuk mengimplementasikan integrasi sistem pengawasan kas berbasis digital antar-dinas agar dapat menjamin transparansi, akurasi data realisasi dan kesesuaian pengeluaran dengan kondisi kas yang ada secara langsung. Menurut (Budiman et al., 2024), pengimplementasian sistem pengawasan keuangan daerah yang didorong oleh teknologi digital dapat meningkatkan ketepatan dan kejelasan data keuangan, serta mempercepat deteksi praktik pengeluaran yang tidak biasa. Pemanfaatan teknologi dengan membuat sistem kontrol keuangan digital yang terhubung ke semua bagian pemerintah daerah dengan itu membuat keputusan menjadi lebih tepat dan meningkatkan keterbukaan informasi keuangan secara langsung.

4) Pelatihan teknis, dari hasil pengamatan di lapangan perlunya pelaksana teknis yang harus mengerti mekanisme pengelolaan kas yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pelatihan yang konsisten dalam mengelola anggaran kas. Menurut (Kamasan et al., 2019), pemerintah daerah perlu untuk menyediakan pelatihan dan program pendidikan bagi pegawai mereka untuk meningkatkan pemahamannya mengenai kerangka keuangan daerah dan praktik pengelolaan kas berdasarkan akuntansi aktual. Setiap pelaksana harus memiliki pengetahuan yang lengkap tentang cara mengelola keuangan dan dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan.
5) Disiplin pelaporan perlunya disiplin dalam pelaporan realisasi juga perlu diperketat untuk mencegah terjadinya pencatatan ganda pada kas yang telah dialokasikan pada periode sebelumnya. Menurut (Hutabarat et al., 2024), pengelolaan keuangan yang sistematis dan teliti mencakup praktik-praktik seperti pencatatan transaksi yang akurat, dan disiplin, serta menghindari pengulangan pencatatan yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam laporan keuangan.

Alur Strategi Pengelolaan Kas



Gambar 4.2 Alur Strategi pengelolaan Kas

Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, diharapan Pemerintah daerah Kabupaten Klaten mampu mengurangi penumpukan SiLPA, meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, serta mencapai keseimbangan fiskal yang tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dari substansi dan dampak kebijakan. Selain itu, pembaruan dalam pengelolaan kas ini akan memperkuat dasar-dasar tata kelola keuangan daerah yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan. (Amelia & Khoiriawati, 2022), menekankan bahwa pengelolaan SiLPA yang baik menunjukkan berkelanjutan kondisi keuangan suatu wilayah sekaligus mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga reputasi serta menjamin kualitas layanan publik yang berkelanjutan.

Analisis tematik atas wawancara dan observasi menemukan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan setiap awal tahun secara triwulan berdasarkan data historis, namun realisasi belanja sering menumpuk di akhir tahun, menyebabkan beban kerja tinggi dan ketrlambatan pencairan, terlihat dari tumpukan Surat Permintaan Pembayaran serta papan monitoring kas yang hanya diperbaharui per triwulan. Walaupun monitoring bulanan sudah diterapkan, evaluasi strategis masih terpusat di tingkat pimpinan sehingga penyesuaian teknis lambat, sementara kegiatan mendesak kerap dilakukan tanpa memastikan saldo kas tersedia. Secara umum, kerangka proyeksi triwulan dan monitoring bulanan sudah ada, tetapi masih terkendala koordinasi, proyeksi yang kurang adaptif, dan tingginya beban administratif di akhir tahun, sejalan dengan tingginya SiLPA 2022-2023 dan prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan publik.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan kas yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk tahun 2022 hingga 2023 belum berjalan dengan baik dalam mempertahankan keseimbangan anggaran yang terlihat dari angka SiLPA yang tinggi, yaitu Rp 529,6 miliar pada tahun 2022 dan Rp 319,4 miliar pada tahun 2023 (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2023, 2024). Metode yang bersifat prosedural tidak dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan belanja secara efektif yang menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan kas dan kurangnya integrasi dalam pengambilan keputusan keuangan di daerah. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian (Septariani & Supra, 2023), yang menyatakan bahwa tingginya nilai SiLPA biasanya menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perencanaan anggaran atau kurang efektifnya pengelolaan kas oleh pemerintah daerah.

Secara teoritis, hasil yang diperoleh sejalan dengan prinsip *value for money* yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran dengan pendekatan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Haryanto (2020), menjelaskan bahwa pengelolaan kas daerah yang optimal harus dapat memenuhi ketiga prinsip dari *value for money* serta didukung oleh sistem informasi kas yang efektif untuk

memastikan dana tersedia untuk pengeluaran rutin dan proyek pembangunan. Lestari & Aswat (2024), juga menekankan bahwa *value for money* merupakan dasar penting dalam mengevaluasi efektivitas perubahan input menjadi output yang memberikan manfaat nyata dalam keuangan publik.

Dalam manajemen keuangan, pengelolaan kas memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan dana daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh (Kurnia & Suhartati, 2020), pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur arus masuk dan keluar kas dengan baik melalui perencanaan yang tepat untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan program pembangunan. Kesalahan dalam anggaran kas seringkali menyebabkan peningkatan SiLPA dan lonjakan pengeluaran di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memperkuat pernyataan (Laoli et al., 2022) dan (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023), yang menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara perkiraan kas dan kebutuhan aktual dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan anggaran. Penelitian ini mendukung kesimpulan oleh (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023), yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara arus kas dan kebutuhan nyata dapat menyebabkan inefektivitas serta ketidaksesuaian dalam struktur anggaran. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh (Laoli et al., 2022) dan (Kaharuddin et al., 2023), yang menyoroti pentingnya sistem informasi yang tepat serta penerapan strategi kas yang sesuai dengan aspek teknis dalam perencanaan anggaran.

Namun, temuan dari penelitian ini berbeda dengan pandangan (Akhmadi & Rachmalia, 2021), yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan kas masih dapat efektif jika direncanakan dengan cermat, bahkan dalam situasi sulit seperti pandemi. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, hambatan lebih disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya koordinasi antar organisasi dan prosedur pengeluaran yang kaku, bukan karena pengaruh eksternal seperti perubahan kebijakan nasional.

Hipotesis utama dalam studi ini menyatakan bahwa pengelolaan kas yang efektif berperan penting dalam menciptakan keseimbangan anggaran. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, hipotesis ini hanya terbukti pada sebagian aspek. Meskipun strategi kas telah dirancang, implementasinya belum cukup fleksibel dalam menyelaraskan waktu pengeluaran dengan pendapatan aktual yang mengakibatkan tingginya SiLPA dan lonjakan belanja di penghujung tahun. (Aini & Ma'ruf, 2020), mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa SiLPA yang tinggi di beberapa daerah disebabkan oleh perencanaan yang tidak memadai dalam menghadapi perubahan realisasi anggaran yang berakibat pada peningkatan intensitas belanja di akhir tahun anggaran.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman yang terdapat dalam literatur mengenai manajemen keuangan daerah dengan menambahkan sudut pandang baru tentang peranan penting strategi kas sebagai penghubung antara efisiensi keuangan dan kualitas belanja publik. Sebelumnya, banyak penelitian yang lebih fokus pada aspek pelaporan dan pelaksanaan APBD tanpa menggali strategi kas lebih mendalam dari sudut pandang manajemen. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan (Putera, 2016), bahwa manajemen kas yang terintegrasi dengan baik dalam sistem perencanaan dan pengendalian dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi keuangan daerah.

Dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini memberikan saran bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten untuk dapat meningkatkan sistem perencanaan kas. Peningkatan ini meliputi penggunaan data proyeksi yang lebih tepat serta penguatan keterampilan teknis pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat dan mendorong stabilitas keuangan daerah. Pandangan ini juga didukung oleh (Juanda & Heriwibowo, 2016), yang mendorong pentingnya penguatan kelembagaan fiskal sebagai langkah utama untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.

Temuan dari penelitian ini memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu bahwa tanpa adanya perencanaan kas yang tepat, pemerintah daerah berisiko mengalami pemborosan anggaran, penumpukan belanja di akhir tahun, serta pelaksanaan proyek yang terburu-buru tanpa perencanaan yang baik. Kondisi ini tidak hanya merugikan dari segi keuangan, namun juga berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan layanan yang dilakukan kepada masyarakat. (Lusiawati & Nugaraha, 2024), juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa penggunaan anggaran yang tidak seimbang dan meningkat di akhir tahun mencerminkan lemahnya perencanaan kas yang pada akhirnya mengurangi efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang pengelolaan kas publik, khususnya terkait dengan hubungan antara strategi kas dan keseimbangan anggaran daerah. Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Putra & Shauki, 2022), yang menekankan bahwa strategi kas yang dirancang dengan baik dapat memperkuat sistem keuangan daerah dan meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan kebijakan keuangan daerah yang lebih responsif, efisien, dan transparan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 hingga 2023 berpengaruh langsung terhadap keseimbangan anggaran yang terlihat dari pergeseran dari surplus menjadi defisit meskipun SiLPA masih tinggi. Ketidaksesuaian antara realisasi anggaran yang direncanakan dan kinerja aktual serta penumpukan pengeluaran pada akhir tahun menunjukkan lemahnya perencanaan kas dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan keuangan yang responsif dan berdasarkan data historis untuk mencapai keseimbangan anggaran yang berkelanjutan.
2. Strategi pengelolaan anggaran kas yang diterapkan Pemerintah daerah Kabupaten Klaten selama 2022 hingga 2023 meliputi penyusunan kas secara triwulan dan evaluasi belanja, namun tetap belum sepenuhnya mampu adaptif dengan perubahan pendapatan dan kebutuhan belanja. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat diterapkan pada strategi pengelolaan anggaran kas, meliputi evaluasi realisasi anggaran secara rutin, monitoring bulanan, integrasi sistem digital, pelatihan teknis, dan disiplin pelaporan. Rekomendasi strategi pengelolaan anggaran kas tersebut diharapkan dapat mengurangi SiLPA, meningkatkan efisiensi pengeluaran, dan menciptakan pengelolaan keuangan yang responsif, jelas, serta berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Optimalisasi proyeksi kas berbasis data masa lalu dimana BPKPAD Kabupaten Klaten disarankan untuk mengembangkan perkiraan kas dengan melihat data masa lalu dan pola pengeluaran triwulan sehingga

dapat meningkatkan akurasi proyeksi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya SiLPA dan penumpukan pengeluaran di akhir tahun.

2. Implementasi sistem kas digital yang terpadu yang mana pemerintah daerah disarankan untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan kas digital yang terintegrasi di berbagai dinas untuk memungkinkan pemantauan kas secara langsung, mempercepat proses distribusi dana, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
3. Penguatan kompetensi SDM dalam pengelolaan anggaran yang sangat penting untuk pelaksanaan pelatihan teknis secara rutin bagi pegawai dinas agar kemampuan mereka dalam mengelola keuangan meningkat, penyampaian laporan realisasi lebih teratur, serta pelaksanaan anggaran berlangsung sesuai dengan batas alokasi yang telah ditentukan.
4. Disiplin pelaporan keuangan dengan penegakan disiplin pelaporan dan pelaksana anggaran perlu diperkuat.
5. Monitoring kas yang dilakukan tidak hanya per triwulan, namun per bulan dengan evaluasi berbasis data *real-time.*

DAFTAR PUSTAKA

Aini, E. N., & Ma'ruf, M. F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Di Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, *8*(2), 1–9.

Akhmadi, M. H., & Rachmalia, A. O. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Kas Bendahara Penerimaan Pemerintah Daerah. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, *9*(2), 113. https://doi.org/10.31764/jiap.v9i2.5219

Alfarisi, S., & Nugroho, R. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MELONJAKNYA PENYERAPAN ANGGARAN QUARTAL IV INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN). *Jurnal BPPK (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan)*, *10*(1), 22–37.

Amelia, F., & Khoiriawati, N. (2022). Analisis SiLPA Sebagai Alat Ukur Pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, *2*(1), 1–20. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.141

Antonius, F. (2023). *Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Metode Vertikal Horizontal Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019-2020*. *1*(4).

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten klaten. (n.d.). *BPKPAD Kabupaten Klaten*. https://bpkpad.klaten.go.id/

Budiman, N. F. S., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2024). *ANALISIS PEMANFAATAN APLIKASI FMIS (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) DALAM MEMENUHI AKUNTABILITAS*

LAPORAN KEUANGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *12*(3), 902–911.

Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). URGENSI ANGGARAN KAS DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG EFISIEN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, *12*(4), 368–382. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Febrianto, M. N., Asiyah, B. N., & Syariah, E. (2024). *STABILITAS EKONOMI DAN NILAI TUKAR INDONESIA : PERPEKTIF*. *7*, 2020–2024. https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i2.1769

Febrianty, Lie, D., Almubaroq, H. Z., Bagenda, C., Ichdan, dany A., Widowati, D., Wakhyuni, E., Romy, E., Abdurohim, Syamil, A., Sapinah, Pujiastuti, E. E., Napitupulu, R. M., Soetandio, L. L., Mahardhika, B. W., & Wardhana, A. (2023). Manajemen Bisnis: Konsep Dan Strateginya. In *CV.Media Sains Indonesia* (Issue June). CV. Media Sains Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/372686018

Frezy, F. R., & Febriyanti, D. (2025). *KINERJA DINAS DLHK KOTA PALEMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SUKAWINATAN KECAMATAN SUKARAME PALEMBANG*. *7*, 119–134.

Ginting, E. (2024). *Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2023*. *2*(1).

Handayani, S., Oktavia, M., Asep, P., Anwar, R., & Dwitara, H. Y. (2024). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Pemerintahan Di Kota Bekasi Tahun 2020-2022*. *7*.

Haryanto, H. (2020). *Pengelolaan Uang Daerah: Adaptasi Dalam Pengelolaan Kas Pemerintah Daerah* (Issue November).

Hasanah, N., & Yanto, H. (2021). Efektivitas Pelatihan Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Dana Desa. *Business and Accounting Education Journal*, *2*(2), 219–234. https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50650

Hutabarat, J. A., Gultom, S. A., Situngkir, A., & Rahman, A. (2024). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SIPAN KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH. *Brilian Dinamis Akuntansi Audit*, *6*. https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/index

Jaya, N. A., Ispriyarso, B., & Natalis, A. (2020). Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance Di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, *10*(1), 24–43. https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1120/garis-kemiskinan-menurut-

Jiman, M. N. T. D. W., Kerihi, A. S. Y., & Dethan, M. A. (2025). Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja, SPIP, dan Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *5*.

Juanda, B., & Heriwibowo, D. (2016). Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *7*(1), 15. https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.419

Kaharuddin, A., Hakim, D. B., & Falatehan, F. (2023). *Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok*. *11*(2), 358–371.

Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *4*(1), 39–46.

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1272

Kartika, I. G. A. Y., & Gorda, A. A. N. E. S. (2022). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(1), 3375. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p05

Kurnia, A. D., & Suhartati, T. (2020). *ANALISIS SIMRAL PADA REKENING KAS UMUM DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR*. *20*(03), 88–98.

Kurnia Indriani, I., Adi Nugroho, Y., & Arindya Sari, W. (2022). Penilaian Kondisi Keuangan Provinsi Kalimantan Barat-Proyeksi dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, *6*(2), 30–52. https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v6i2.2171

Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah Laoli Ayler Ndraha Yasminar Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penggangaran) Sipd Implementation in Regional Financial Management in Nias District (Case Study of Bpkpd As the Leading Budgeting Se. *Emba*, *10*(4), 1381–1389.

Lestari, D. A., & Aswat, I. (2024). *Implementation of the Value for Money Concept in Measuring Financial Performance at the Library and Archives Service of West Kalimantan Province*. *12*(5). https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2532

Lusiawati, L., & Nugaraha, A. (2024). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KECAMATAN X KOTA BANDUNG*. *4*(1), 85–95.

Makaminang, N. E., Ilat, V., & Wokas, H. R. N. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, *6*(1), 325–334.

Pambudi, A. S. (2021). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Dak Fisik Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *11*(1), 1–17. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1536

Paputungan, N. C. (s), M. H. (s), R. S. (s). (2023). Analisis Penerapan Pp No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *18*(71), 192–201.

Pemerintah Kabupaten Klaten. (2023). *Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022*.

Pemerintah Kabupaten Klaten. (2024). *Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023*.

Prasetia, D., Saladin, H., & Nurmala, N. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI). *ECo-Fin*, *6*(2), 441–451. https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1172

Putera, R. E. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. *Sosiohumaniora*, *18*(3), 253. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.6075

Putra, G. A. P., & Shauki, E. R. (2022). Motivasi dan Kendala Percepatan Penyaluran Kas Daerah. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *7*(2), 175–191. https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.488

Rahman, A. Z. (2022). *Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap*. *22*(2), 117–126. https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.

Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, *1*(1), 31–37. https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155

Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, *19*, 68. www.researchgate.net

Salman, & Ikbal, M. (2025). *Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran : Ditinjau*. *1*(2), 68–72.

Septariani, J., & Supra, D. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah*, *6*(2), 198. https://doi.org/10.51877/jiar.v6i2.284

Sitasari, N. W. (2022). Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif. *Forum Ilmiah*, *19*, 77.

Ulfah, A. A., Salsabilah, A., Nasution, A. R., Lubis, S., Panjaitan, T., & Manik, M. M. (2024). *Analisis Kebijakan Peran Pemerintah dalam Membentuk APBN dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *8*(October), 26569–26578.

Undari Sulung, M. M. (2021). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *2*(2), 28–33.

Viroza, D., & Yasmin, P. (2025). *Optimalisasi Anggaran Kas dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan*. *2*(1), 434–442.

Wawancara, E. (2025). *Wawancara Penelitian*.

Wulandari, W. P., Kuntadi, C., Karunia, R. L., Anggaran, K., Anggaran, P., & Masalah, L. B. (2021). *LITERATURE REVIEW : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUMPUKAN PENYERAPAN*

ANGGARAN DI. 253–265.

Yusuf, S. D., & Muthi'ah, S. (2019). Problematika Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun (Studi Kasus di IAIN Sultan Amai Gorontalo). *Jurnal MANAJERIAL*, *19*(1), 514–523.

Zulfan Heri, Zaili Rusli, & Febri Yuliani. (2022). Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, *15*(3), 400–412. https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.12182

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar pertanyaan wawancara staf BPKPAD Kabupaten klaten Bidang Perbendaharaan

1. Perencanaan strategi kas
    1) Bagaimana proses penyusunan strategi kas tahunan dilakukan?
    2) Apakah ada proyeksi pendapatan dan pengeluaran bulanan?
    3) Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan kas?
2. Tantangan dan hambatan
    1) Apa hambatan utama dalam pelaksanaan kas tahun 2022-2023?
    2) Apakah keterlambatan dana pusat berdampak?
    3) Bagaimana dampak penumpukan belanja akhir tahun?
3. Pengendalian dan monitoring
    1) Apakah ada monitoring arus kas?
    2) Bagaimana BPKPAD Kabupaten klaten memantau potensi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)?
    3) Apakah dilakukan evaluasi strategi kas secara berkala?
4. Keseimbangan dan efisiensi
    1) Bagaimana strategi kas mempengaruhi keseimbangan anggaran?
    2) Apakah strategi kas berdampak pada efisiensi belanja?
    3) Bagaimana BPKPAD Kabupaten Klaten menyikapi tingginya SiLPA tahun 2022-2023?
    4) Apa aspek strategi kas yang peling perlu untuk ditingkatkan?
    5) Apakah ada rencana perubahan kebijakan pengelolaan kas?

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 3010/Ka.ProdiMnj/60/Prodi.Mnj/XII/2023
Perihal : Permohonan Izin Magang

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Kepada Yth.

Pimpinan

Kepala BPKPAD

Kabupaten Klaten

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia adalah institusi Pendidikan yang memiliki tujuan menciptakan lulusan profesional di bidangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak atau Ibu memberikan izin mahasiswa kami dalam melaksanakan magang di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama	: Tiffani Berliana Guntoro
NIM	: 21311523
Alamat	: Tanjunganom RT02/RW01, Krajan, Jatinom, Klaten
Tempat/Tgl. Lahir	: Klaten, 31 Januari 2003
Program Studi	: Manajemen
Jenjang	: Sarjana
Periode Magang	: 12 Februari 2024 – 12 Juni 2024

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kaprodi Manajemen S1



Abdur Rafik, S.E., M.Sc.
NIK : 133110105

Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang

Perihal : Persetujuan Mahasiswa Magang / PPL / KKN

Kepada Yth.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Cq. Kepala Bidang PPPE BAPPEDA
Kabupaten Klaten
Di - Klaten

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama	: Anggara Benny Kusumastanto, SH, MH
NIP	: 19770927 200501 1 005
Pangkat/Gol	: Pembina / IV a
Jabatan	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
Instansi	: BPKPAD Kabupaten Klaten

Menyetujui dan bersedia menerima mahasiswa/i :

1	Nama	:	Tiffani Berliana Guntoro
	Nomor Induk Mahasiswa	:	21311523
	Jurusan	:	Manajemen
	No. HP	:	082133447052
	Asal Perguruan Tinggi	:	Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Untuk melaksanakan Magang Prigel mulai tanggal 12 Februari 2024 s/d 12 Juni 2024
Demikian, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Klaten, 19 Desember 2023
Mengetahui
An. Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten
Sekretaris
Ub. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Anggara Benny Kusumastanto, SH, MH
Pembina
NIP. 19770927 200501 1 005

Lampiran 3. Daftar Hadir Magang

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Februari 2024

Nama Instansi : BPKPAD Kabupaten Klaten

Nama Mahasiswa : Tiffani Berliana Guntoro

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

No	Tanggal	Lama kerja	Deskripsi Singkat Aktivitas
1	12 Februari 2024	6 jam 30 menit	Perkenalan lingkungan dan penjelasan tugas yang terdapat di BPKPAD kabupaten Klaten bidang perbendaharaan.
2	13 Februari 2024	6 jam 30 menit	Input Buku Kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan Januari
3	14 Februari 2024	-	Libur Pemilu
4	15 Februari 2024	-	Izin
5	16 Februari 2024	3 jam 30 menit	Input Buku Kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan Januari
6	19 Februari 2024	6 jam 30 menit	Input Buku Kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan Januari
7	20 Februari 2024	6 jam 30 menit	Input Buku Kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan Januari
8	21 Februari 2024	6 jam 30 menit	Input Buku Kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan Februari
9	22 Februari 2024	6 jam 30 menit	Input Buku Kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan Februari
10	23 Februari 2024	-	Tidak ada kegiatan di kantor
11	26 Februari 2024	6 jam 30 menit	Rekap SP2D DAK Non Fisik DINSOS 2023

12	27 Februari 2024	6 jam 30 menit	Rekap SP2D DAK Non Fisik DINSOS 2023
13	28 Februari 2024	6 jam 30 menit	Input laporan realisasi penyerapan anggaran dana BOKB 2023
14	29 Februari 2024	6 jam 30 menit	Input laporan realisasi penyerapan anggaran dana BOKB 2023

Catatan dari supervisor:

Dalam melaksanakan magang Mahasiswa penuh tanggung jawab dan disiplin. Untuk mengerjakan tugas selalu dikerjakan sampai selesai.

Klaten, 29 Februari 2024

Tiffani Berliana Guntoro

Handaka, S.E

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Maret 2024

Nama Instansi : BPKPAD Kabupaten Klaten

Nama Mahasiawa : Tiffani Berliana Guntoro

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

No	Tanggal	Lama kerja	Deskripsi Singkat Aktivitas
1	1 Maret 2024	3 jam 30 menit	Rekap SP2D DAK Non Fisik DINSOS 2023 dan Input laporan realisasi penyerapan anggaran dana BOKB 2023
2	4 Maret 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
3	5 Maret 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
4	6 Maret 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keteragan, dan Surat Tanda Setor (STS)
5	7 Maret 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
6	8 Maret 2024	3 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
7	11 Maret 2024	-	Libur Hari Raya Nyepi
8	12 Maret 2024	-	Libur Awal Puasa
9	13 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
10	14 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
11	15 Maret 2024	3 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
12	18 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tada Setor (STS)

13	19 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS); Input buku kas (penerimaan, pengeluaran saldo) Bulan Februari
14	20 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
15	21 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
16	22 Maret 2024	3 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
17	25 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
18	26 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
19	27 Maret 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
20	28 Maret 2024	6 jam	Input bukukas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
21	29 Maret 2024	-	Libur

Catatan dari supervisor:

Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan magang sudah melaksanakan dan mengerjakan tugasnya penuh tanggung jawab dan tepat waktu. Mahasiswa magang sudah mentaati peraturan yang diberikan.

Klaten, 29 Maret 2024

Tiffani Berliana Guntoro

Handaka, S.E.

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: April 2024

Nama Instansi : BPKPAD Kabupaten Klaten

Nama Mahasiswa : Tiffani Berliana Guntoro

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

No	Tanggal	Lama kerja	Deskripsi Singkat Aktivitas
1	1 April 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
2	2 April 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
3	3 April 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
4	4 April 2024	6 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
5	5 April 2024	3 jam	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
6	8 April 2024	-	Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri
7	9 April 2024	-	
8	10 April 2024	-	
9	11 April 2024	-	
10	12 April 2024	-	
11	15 April 2024	-	
12	16 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
13	17 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
14	18 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
15	19 April 2024	3 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
16	22 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS); Input buku kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan Maret

17	23 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
18	24 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS); Input buku kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan Maret – April
19	25 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tnada Setor (STS); Mengikuti rapat rapat realisasi anggaran dana
20	26 April 2024	3 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
21	29 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
22	30 April 2024	6 jam 30 menit	Input buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)

Catatan dari supervisor:

Tugas yang diberikan Mahasiswa Magang Untuk melaksanakan tugas pengkuitan buku kas dan STS dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur kegiatan.

Klaten, 30 April 2024

Tiffani Berliana Guntoro

Handaka, S.E.

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Mei 2024

Nama Instansi : BPKPAD Kabupaten Klaten

Nama Mahasiswa : Tiffani Berliana Guntoro

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

No	Tanggal	Lama kerja	Deskripsi Singkat Aktivitas
1	1 Mei 2024	-	Libur Hari Buruh
2	2 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
3	3 Mei 2024	3 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
4	6 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
5	7 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
6	8 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
7	9 Mei 2024	-	Libur Kenaikan Isa Almasih
8	10 Mei 2024	-	Cuti Bersama Kenaikan Isa Almasih
9	13 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
10	14 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
11	15 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
12	16 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
13	17 Mei 2024	3 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS) Inputing rekening koran
14	20 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
15	21 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)

			Inputing buku kas (penerimaan, pengeluaran, dan saldo) Bulan April – Mei
16	22 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
17	23 Mei 2024	-	Libur Hari Raya Waisak
18	24 Mei 2024	-	Cuti Bersama Hari Raya Waisak
19	27 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
20	28 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
21	29 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
22	30 Mei 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
23	31 Mei 2024	3 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)

Catatan dari supervisor:

Mahasiswa dalam menyelesaikan kegiatan magang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu. Peningkatan dalam berkomunikasi yang baik dengan anggota staf untuk mendapatkan arahan dan informasi yang diperlukan.

Klaten, 31 Mei 2024

Tiffani Berliana Guntoro

Handaka, S.E.

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Juni 2024

Nama Instansi : BPKPAD Kabupaten Klaten

Nama Mahasiswa : Tiffani Berliana Guntoro

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

No	Tanggal	Lama kerja	Deskripsi Singkat Aktivitas
1	3 Juni 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
2	4 juni 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
3	5 Juni 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
4	6 Juni 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
5	7 Juni 2024	3 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
6	10 Juni 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
7	11 Juni 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)
8	12 Juni 2024	6 jam 30 menit	Inputing buku kas, berita/keterangan, dan Surat Tanda Setor (STS)

Catatan dari supervisor:

Mahasiswa Magang dalam menjalankan Tugas dan kegiatan Magang mampu menyelesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mahasiswa Magang penuh disiplin dan tanggung jawab.

Klaten, 12 Juni 2024



Tiffani Berliana Guntoro



Handaka, S.E.